BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Safrida et al, 2010). Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaaan keuangan negara adalah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Purwaniati dan Imam, 2008).

Terkait dengan masalah akuntabilitas di Indonesia menurut Wahyudi Kumorotomo (2010) dalam Mei Anjarwati (2012). ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah. Berkaitan dengan administrative accountability dan profesional accountability isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan itu bisa di ketahui dari semakin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah

(LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebagai salah satu kosekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu persyaratan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka amanat rakyat. Maka dengan itu Pemerintah Daerah harus paham dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang undang No 17 tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Purwaniati dan Imam, 2008). Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam penngelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mempu mengelola keuangan mengenai sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelolaan keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang benar maka akan terwujud good governace.(Sri Dewi Wahyundaru, 2001) dalam (Lyna dan Arifin, 2007)

Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, di perlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desantralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi.

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sama dengan tujuan penyusunan sistem akuntansi antara lain : 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan. 2) Untuk memperbaiki infomasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi. 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Memurut (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai daam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan pemerintah yng berkualitas harus dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dipahami (SPAP KK, 2005) dalam (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012). Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kiteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektitivitas sistem pengendalian intern (Ifa dan Mochammad Ridwan, 2012).

Bedasakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian inten meliputi bebagai kebijakan yaitu, (1) tekait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standa akuntansi pemerintahan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Salah satu komponen pengendalian intern sendiri yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian bekala atau berkelanjutan dari mutu penempilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasikan sesuai dengan peubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2013 di Auditorium BPK, Rabu (28/5), Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, M.M., menyampaikan LHP kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Terdapat 5 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pebgecualian (WTP) dalam hal penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kota Cimahi. 11 Pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Subang. Sedangkan untuk Kabupaten Indramayu mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclimer Opinion. Permasalahan Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan yang masih banyak kelemahan, kelebihan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, dan terdapat penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih jadi pengecualian bagi banyak Pemda (bandung.bpk.go.id, 2/6/2014).

Juga diperkuat dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (inilahkoran.com, 23/2/2015) yang menilai kinerja eksekutif hingga saat ini belum optimal. Karena keraguannya itulah, predikat WTP yang diidamkan Kabupaten Bandung Barat selama ini bakal sulit tercapai. Masalah yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat yaitu :

1. Kinerja eksekutif yang masih lemah
2. Terdapat beberapa program kerja yang tidak terlaksana
3. Lemahnya pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Dari fenomena tersebut bisa dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta masih memiliki kekurangan dalam sistem pengendalian intern, sehingga belum bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **" Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat".** Judul ini juga diperkuat oleh beberapa jurnal diantaranya ;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida, Nyoman dan Ni Kadek pada jurnal yang berjudul "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah" dengan hasil penelitian di ketahui pertama, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhdap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah akan meningkat. Kedua, pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan maka nilai informasi pelaporan keuangan pemeintah daerah akan meninggkat. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah

secara bersama sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keempat, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintahan akan meningkat. kelima, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah (Ida et al).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Komang, Wayan dan I Wayan yang berjudul "Pengauh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Derah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPS) " dengan hasil (1) sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintahpada SKPD di Kabupaten Buleleng, (2) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng, (3) pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng dan (4) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kinerja eksekutif pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang belum optimal sehingga masih sulit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Masih kurangnya pemahamam mengenai Standar Akuntasi Pemerintahan sehingga masih kurang dalam pengelolaan keungan pemerintah daerah.
3. Pelaporan keuangan yang lemah dimana terdapat program penganggaran yang masih rancu, dan ketidak lengkapan dokumen.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data secara empiris dan informasi mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah pada Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti melalui penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan, adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Bagi Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan kualitas Laporan Keuangan Daerah yang baik.

Bagi penulis, seluruh rangkaian penelitian serta hasilnya dihapakan dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan di bidang Sistem Informasi Akuntansi serta pengendalian Intern sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan Akuntansi Pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna sebagai referensi untuk civitas akademia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang saya pilih untuk melakukan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan yang menjadi responden yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan adalah bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2015.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2015				April 2015				Mei 2015				Juni 2015				Juli 2015				Agustus 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mengajukan izin pada Instansi																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b.Bimbingan UP																								
	c. Pengumpulan Data																								
	d. Pengolahan Data																								
3	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d. Pengumpulan draf skripsi																								